

Gugur Saat Tugas, Pratu Roy Naik Pangkat Menjadi Praka

BANDUNG (IM) - Panglima TNI Marsekal Hadi memberikan kenaikan pangkat luar biasa kepada Praka Anumerta Roy Vebrianto, yang gugur saat melakukan operasi keamanan.

Roy gugur saat operasi keamanan Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) RI-Papua Nugini, Jumat (22/1) lalu, sesaat sedang bersih-bersih setelah menunaikan Shalat Subuh. "Anugerah diberikan kepada almarhum kenaikan pangkat luar biasa, satu tingkat," kata Komandan Depo Pendidikan Bela Negara Rindam III Siliwangi Letkol Inf TB Busyro usai prosesi pemakaman di Taman Makam Pahlawan Cikutra, Kota Bandung, Minggu (24/1).

Busyro menyebut, almarhum Roy mendapatkan

pangkat satu tingkat dari pangkat sebelumnya karena gugur saat melakukan operasi kemanusiaan.

"Semasa hidupnya almarhum berpangkat Prajurit Satu dan mendapatkan kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi sesuai keputusan Panglima TNI, menjadi Prajurit Kepala (Praka) Anumerta," ungkapnya.

Busyro menambahkan, prosesi pemakaman berlangsung secara khidmat tanpa mengabaikan protokol kesehatan.

"Semua berjalan lancar, tertib dan aman. Kegiatan ini merupakan bentuk penghormatan terakhir kepada almarhum dari bangsa dan negara, khususnya dari Tentara Nasional Indonesia atas masa baktinya almarhum selama hidupnya," ujarnya.

● **mei**

Kubu Rizieq Siap Hadapi PTPN VIII soal Lahan di Megamendung

JAKARTA (IM) - PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII melaporkan Habib Rizieq Shihab ke Bareskrim Polri terkait penggunaan lahan tanpa izin Pondok Pesantren Alam Agrokultural Markaz Syariah, Kecamatan Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Pongpes tersebut didirikan oleh Habib Rizieq Shihab.

Salah satu kuasa hukum Habib Rizieq Shihab, Aziz Yanuar mengatakan, pihaknya tidak pernah mencari masalah dengan PTPN VIII. Oleh karenanya, pihak Habib Rizieq Shihab bersiap untuk menghadapi laporan PTPN VIII soal izin penggunaan lahan Pondok

Pesantren Markaz Syariah.

"Hasbunallah wa nikhmal wakiil. Kita tidak pernah mencari masalah dengan pihak lain, tapi kalau masalah datang, maka kita pantang mundur," kata Aziz, Minggu (24/1).

Aziz pun menjelaskan bahwa pihaknya telah menjawab soal izin Pondok Pesantren Markaz Syariah di atas lahan PTPN VIII lewat balasan surat somasi. Namun, kata Aziz, Habib Rizieq Shihab bersiap menjelaskan kembali soal penggunaan lahan itu jika dipanggil polisi.

"Kalau masalah lebih jauh kita nanti jelaskan di polisi atau pengadilan saja. Sudah kita jawab di somasi (soal izintandasnya)." ● **mei**

2 | Polhukam

IDN/ANTARA



PEMAKAMAN PRAJURIT TNI YANG GUGUR DI PAPUA

Keluarga menyentuh foto almarhum Praka (Anumerta) Roy Vebrianto, Anggota Yonif Raider 400/BR setelah melaksanakan prosesi pemakaman di Taman Makam Pahlawan, Cikutra, Bandung, Jawa Barat, Minggu (24/1). Praka (Anumerta) Roy Vebrianto gugur akibat tertembak oleh kelompok kriminal bersenjata pada Jumat (22/1) saat melaksanakan tugas di Papua.

Mahfud MD: Kita Tak Boleh Wajibkan Anak Nonmuslim Pakai Jilbab di Sekolah

Bila ada sekolah mewajibkan siswa nonmuslim mengenakan jilbab merupakan sebuah insiden yang membahayakan generasi pelajar.

JAKARTA (IM) - Tindakan intoleransi terhadap siswi nonmuslim yang diminta mengenakan hijab di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 2 Padang, Sumatera Barat, menimbulkan kritik. Saat ini kasus tersebut sudah ditangani oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Menko Polhukam Mahfud MD mengingatkan tidak boleh ada pemaksaan dalam penggunaan atribut agama ke siswa. Dia menyamakan hal itu dengan pelanggaran hijab yang terjadi di Indonesia pada tahun 1980-an.

"Akhir 1970-an s-d 1980-an anak2 sekolah dilarang pakai jilbab. Kita protes keras aturan tsb ke Depdikbud. Setelah sekarang memakai

jilbab dan busana muslim di-bolehkan dan menjadi mode, tentu kita tak boleh membalik situasi dgn mewajibkan anak nonmuslim memakai jilbab di sekolah," kata Mahfud MD melalui akun Twitternya, Minggu (24/1).

Mahfud mengatakan jilbab kembali diperbolehkan berkat perjuangan berbagai tokoh Islam. Dia menyebut saat itu ada diskriminasi yang dirasakan umat Islam.

"S-d akhir 1980-an di Indonesia terasa ada diskriminasi thd orang Islam. Tp berkat perjuangan yg kuat dari NU Muhammadiyah dll, terutama melalui pendidikan, demokratisasi menguat. Awal 90-an berdiri ICMI. Masjid dan majelis taklim tumbuh di berbagai kantor pemerintah

dan kampus2," tulis Mahfud.

Bila ada sekolah mewajibkan siswa nonmuslim mengenakan jilbab merupakan sebuah insiden yang membahayakan generasi pelajar. Hal ini disampaikan politisi PKB, Anggia Ermarini, menanggapi kasus yang terjadi di SMKN 2 Padang.

"Insiden ini membahayakan generasi pelajar karena sejak sekolah sudah diajarkan tidak berdaulat menjalankan keyakinan agamanya," ujar Anggia Ermarini yang juga Ketua DPW PKB Sumbang, melalui akun Instagram @anggierrmarini, dikutip Minggu (24/1).

Anggi yang juga Wakil Ketua Komisi IV DPR ini mengatakan, sikap pihak sekolah yang menggunakan argumentasi bahwa hal itu adalah peraturan sekolah yang harus ditaati tidak bisa dibenarkan.

Menurutnya, dalam Permendikbud 45 tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik

Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah yang berisi 7 pasal dan lampiran serta penjelasan sebanyak 13 halaman, jelas-jelas tidak ada aturan mewajibkan pemeluk agama lain untuk menggunakan jilbab. Dalam pasal 4 ayat 1 aturan seragam muslimah hanya diperuntukkan bagi siswi beragama muslim.

"Kita mengancam kebijakan SMKN 2 Padang ini yang dapat mengganggu mental para siswa dalam mengamalkan kebhinekaan sebagai warga bangsa Indonesia," kata Ketua Umum PP Fatayat NU ini.

Sebelumnya, Kemendikbud menyebut harus ada sanksi tegas terhadap setiap pelaku yang terbukti melanggar peraturan berujung tindakan intoleransi di satuan pendidikan. Kemdikbud juga menyesalkan tindakan intoleransi siswi nonmuslim diminta mengenakan hijab di Padang.

"Ketentuan mengenai pakaian siswa/siswi di satuan pendidikan telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan," ujar Direktur Jenderal Pendidikan Volaksi Kemdikbud Wilan Sakarinto di Jakarta, Sabtu (23/1). ● **han**

Vaksin Mandiri Dikhawatirkan dikuasai Orang Mampu Ketimbang yang Butuh

JAKARTA (IM) - Epidemiolog asal Griffith University Australia, Dicky Budiman mengatakan, privatisasi vaksin justru berbahaya untuk pengendalian pandemi. Sebab, vaksin tersebut berpotensi dikuasai hanya orang-orang berduit saja, ketimbang orang-orang yang benar-benar membutuhkan.

"Privatisasi vaksin ini menjadi ide yang kontradiktif dan cenderung berbahaya karena privatisasi ini akan menempatkan orang yang kaya, memiliki akses secara ekonomi akan lebih ada di depan dalam mengakses vaksin ini dibanding dari orang yang memerlukan," ungkap Dicky melalui pesan suara, yang diterima wartawan, Minggu (24/1).

"Jadi beda, orang yang bisa membeli dengan orang yang memerlukan. Itu dua hal yang berbeda, dan ini artinya kita melawan dari prinsip pengendalian pandemi itu sendiri," jelasnya.

Menurutnya, seharusnya vaksin Covid-19 diutamakan lebih dulu diberikan kepada

mereka yang lansia, punya penyakit bawaan (komorbid) serta pekerja esensial. Di mana, kata Dicky, bisa saja golongan tersebut ekonominya tidak mencukupi untuk membeli vaksin.

"Orang yang harus kita lindungi ini umumnya lansia, komorbid, pekerja esensial, yang sebagian besar kemungkinan tidak memiliki kemampuan secara ekonomi," terangnya.

Wacana privatisasi vaksin di tengah pandemi, bukan yang pertama kali di Indonesia. Hal itu sudah sering terjadi di tengah pandemi dengan motif ekonomi di belakangnya. Hal itu sangat berbahaya dalam segi pengendalian pandemi.

"Ini seakan membenturkan sektor ekonomi dengan public health, karena ini harus dipahami bahwa disisi bahwa memang adanya kebutuhan dari sisi pengusaha, ekonomi, ada kebutuhan sektor kesehatan, tapi yang jelas, saat ini kondisi adalah pandemi, pandemi yang dihadapi semua masyarakat di dunia," ucapnya. ● **han**

Bakamla Amankan Kapal Tanker Panama dan Iran yang Diduga Transfer BBM Ilegal

JAKARTA (IM) - Petugas Badan Keamanan Laut (Bakamla) mengamankan dua kapal tanker berbendera Iran dan Panama yang diduga melakukan transfer bahan bakar minyak (BBM) ilegal di perairan Pontianak, Kalimantan Barat, Minggu (24/1).

"Proses pengamanan tersebut dilakukan saat KN Marore 322 yang dikomandani Letkol Bakamla Yuli Eko Prihartono sedang melaksanakan Operasi Keamanan dan Keselamatan Laut Dalam Negeri Trisula-1/21," ujar Kabag Humas dan Protokol Bakamla Kolonel Bakamla Wisnu Pramandita dalam keterangan tertulis, Minggu siang.

Penangkapan ini bermula ketika KN Marore 322 mendeteksi kontak radar diam dengan indikasi sistem identifikasi otomatis atau automatic identification system (AIS) dimatikan pada baringan 260, jarak 17NM posisi 00° 02' U - 107° 37' T.

KN Marore kemudian bergerak mendekati kontak dengan kecepatan 16 knot. Tak lama berselang, sekitar pukul 06.00 WIB, KN Marore 322 berhasil mendeteksi secara visual. Dalam penangkapan visual tersebut, KN Marore 322 mengetahui ada dua kapal jenis kapal tanker sedang melaksanakan ship to ship yang diduga melakukan transfer BBM ilegal.

Saat mendekati dua kapal tanker tersebut, petugas mendapati bahwa dua kapal

tersebut dengan sengaja menutup nama lambung kapal dengan kain.

"(Tujuannya) untuk mengelabui aparat penegak hukum Indonesia," kata Wisnu. Baca juga: Jelang Tahun Baru, Bakamla RI Tangkap 3 Kapal Pencuri Ikan Asal Malaysia

Selanjutnya, KN Marore-322 melakukan kontak radio channel 16 untuk menanyakan perihal keberadaannya di perairan Pontianak. Dalam usaha kontak radio ini, petugas tidak mendapat respons dari kedua kapal. Hal ini pun menambah kecurigaan petugas di KN Marore-322.

Menindaklanjuti kecurigaannya, Komandan KN Marore 322 menghubungi Direktur Operasi Laut Laksmi Bakamla Suwito dan mendapatkan perintah untuk melaksanakan pemeriksaan serta pengeledahan. Dari pemeriksaan awal diketahui bahwa dua kapal tanker tersebut bernama MT Horse berbendera Iran dan MT Frea berbendera Panama.

"Dugaan awal, kedua kapal tanker melanggar hak lintas transit pada ALKI I dengan keluar dari batas 25NM ALKI melakukan lego jangkak di luar ALKI, melaksanakan ship to ship transfer BBM ilegal, tidak mengibarkan bendera kebangsaan, AIS dimatikan serta MT Frea melaksanakan oil spilling," papar Wisnu. Berikutnya, kedua kapal ini digiring menuju Batam untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut. ● **mei**



KORBAN TERTEMBAK KKB DI PAPUA

Ayah dari Pratu Dedi Hamdani, Muhdin (50) menunjukkan foto kenangan bersama Dedi Hamdani saat menunggu kedatangan jenazah putranya di Dusun Bagek Dewe, Desa Pelambik, Kecamatan Praya Barat Daya, Lombok Tengah, NTB, Minggu (24/1). Pratu Dedi Hamdani adalah prajurit TNI dari Yonif R 400/BR yang gugur ditembak Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di kampung Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua pada Jumat (22/1) bersama Pratu Roy Vebrianto asal desa Manggahang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Oknum ASN di Riau Ditangkap karena Jual Satwa Dilindungi

PEKANBARU (IM) - Seorang oknum aparat sipil negara (ASN) diduga memperdagangkan satwa yang dilindungi. Pria berinisial AI kini diamankan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau, Kombes Andri Sudarmadi mengatakan, tersangka diduga memperjualbelikan satwa jenis burung betet. Dia memperdagangkan secara online.

"Dari tangan tersangka kita amankan puluhan burung betet (psittacula longicauda)," kata Andri, Minggu (24/1).

Andri menjelaskan bahwa pihaknya melacak ada perdagangan burung betet di Facebook (FB). Ada akun atas nama Viet mengesepi memperjualbelikan satwa dilindungi itu. Petugas pun memancingnya untuk bertransaksi.

Andri memaparkan, petugas melakukan transaksi terletak di rumah tersangka Jalan Bukit Barisan Gang Anggrek Kecamatan

Tenayan Raya, Pekanbaru. Awal dilakukan pembelian, tersangka hanya memperlihatkan delapan ekor burung betet. Selanjutnya dilakukan pendalaman.

"Dari hasil interogasi dan pemeriksaan di tempat kejadian perkara ditemukan kembali 21 ekor burung betet yang disembunyikan pelaku di belakang rumah. Jadi total ada 29 ekor burung," tuturnya.

Pihak penyidik Polda Riau melakukan koordinasi dengan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau terkait satwa dilindungi itu.

"Hasil koordinasi dengan pihak BBKSDA Riau dinyatakan bahwa barang bukti tersebut termasuk dalam kategori satwa yang dilindungi. Kita jerat tersangka dengan Pasal 21 Ayat (2) huruf d juncto Pasal 40 Ayat 2 UU RI Nomor 05 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara," kata Andri. ● **mei**



ANTISIPASI LONJAKAN KASUS COVID-19

Sejumlah warga mengenakan masker saat bermain di Taman Tunjuk Ajar Melayu, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Minggu (24/1). Pemerintah Indonesia berupaya menekan penyebaran pandemi, salah satunya mengajak masyarakat selalu mengenakan masker, karena sejak awal tahun 2021 terjadi lonjakan kasus COVID-19 baru yang rata-rata mencapai 10.000 orang dalam sehari dengan total kasus akumulatif sudah lebih dari 977.474 orang berdasarkan data Satgas COVID-19.